

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR



2025

PEMERINTAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Blitar selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja atas sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, serta analisis atas faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Blitar secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Blitar.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar.

Blitar, 5 Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

EXECUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan investasi daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Pada Tahun 2025, DPMPTSP Kota Blitar menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu:

1. Meningkatnya jumlah realisasi investasi, dengan indikator jumlah realisasi investasi daerah.

Realisasi investasi Kota Blitar Tahun 2025 mencapai Rp437,53 miliar dari target sebesar Rp389 miliar atau dengan tingkat capaian sebesar 112,48%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Blitar semakin kondusif yang didukung oleh kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, kegiatan promosi investasi, pendampingan pelaku usaha, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Struktur investasi daerah pada Tahun 2025 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang memberikan kontribusi sebesar Rp253,98 miliar atau sekitar 58% dari total investasi, diikuti oleh sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp47,57 miliar serta sektor Konstruksi sebesar Rp39,21 miliar. Dari sisi skala usaha, realisasi investasi sebagian besar berasal dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp333,09 miliar atau 76,1%, sedangkan Non-UMK berkontribusi sebesar Rp104,43 miliar atau 23,9%.

2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2025 terealisasi sebesar 86,44 dari target sebesar 85,69 atau dengan capaian sebesar 100,88%, yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja perangkat daerah berada pada kategori sangat baik.

Secara umum, capaian kinerja DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi realisasi investasi maupun kinerja perangkat daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Dasar Hukum	4
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	13
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023- 2025 ...	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun s.d akhir Periode Renstra	18
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	18
B. Akuntabilitas Keuangan	19
1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	19
2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	21
3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Langkah Perbaikan	26

Lampiran:

➤ Matrik Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	30
➤ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	31
➤ Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
➤ Pengukuran Kinerja Tahun 2025	39
➤ Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan realisasi investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pelaporan kinerja yang sistematis, terukur, dan akuntabel untuk menilai sejauh mana capaian kinerja DPMPTSP Kota Blitar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

LKjIP DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2025 disusun sebagai media evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja atas sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi target, serta analisis atas faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai bahan perbaikan (feedback) dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, LKjIP diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga

menjadi instrumen manajerial yang mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar:

- **Kedudukan:** DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- **Tugas Pokok:** Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- **Fungsi:**
 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
 7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

penatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

- 1) Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- 2) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 3) Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;

- 4) Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- 5) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- 6) Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek-aspek Strategis

- a. Kebijakan nasional tentang implementasi OSS RBA menjadi dasar utama pelayanan perizinan di daerah.
- b. Investasi daerah sebagian besar ditopang oleh aktivitas sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tersebar di berbagai bidang usaha, menjadikannya sebagai penyangga utama perekonomian lokal.
- c. Kondisi keamanan yang relatif kondusif, ketersediaan infrastruktur dasar dan kemudahan perizinan merupakan faktor pendukung dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

F. Isu-isu Strategis

1. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang perizinan usaha baik melalui pendampingan dan/atau sosialisasi maupun publikasi media sosial dan elektronik.
2. Keberadaan MPP diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai yaitu mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
3. Mengoptimalkan layanan Jempol Lisa (Jemput Bola Layanan Perizinan Usaha) agar legalitas usaha dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha di Kota Blitar.
4. Menyediakan data dan informasi perizinan serta penanaman modal baik secara digital maupun manual sehingga jika server pusat mengalami down, data manual masih tersedia.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021–2026. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam urusan penanaman modal, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan perizinan.

DPMPTSP Kota Blitar melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar, khususnya Misi 3 dan Misi 5. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penetapan sasaran strategis, program, serta kegiatan yang berorientasi pada peningkatan investasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” mendukung Misi 3 “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”, pada Tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi” pada Sasaran “Meningkatnya nilai investasi daerah”. Sasaran ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kemudahan berusaha di Kota Blitar.

Sasaran strategis “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” mendukung Misi 5 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi”, pada Tujuan “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi” pada Sasaran “Meningkatnya tata kelola perangkat daerah”. Sasaran ini difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola DPMPTSP.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Misi Walikota	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Ekonomi Kreatif, Pariwisata & Perdagangan Digital	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang
Misi 5: Tata Kelola Pemerintahan Berbasis TI	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala DPMPTSP dengan Wali Kota sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah. PK ini menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, DPMPTSP menetapkan dua sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan iklim investasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (85,69)

Sasaran pertama diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, promosi potensi daerah, serta penguatan iklim penanaman modal. Sasaran kedua berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP agar selaras dengan prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut, DPMPTSP didukung dengan alokasi anggaran melalui lima program, yaitu:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000	Pendapatan Bagi Hasil
2	Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974	Pendapatan Bagi Hasil
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	297.511.000	Pendapatan Bagi Hasil
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94.742.500	Pendapatan Bagi Hasil
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.550.630.758	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar tahun 2024, telah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Untuk mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, berikut laporan hasilnya:

Tabel 2.4
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP DPMPTSP Tahun 2024

No.	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/ Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Pelayanan publik masih tersebar di berbagai instansi sehingga masyarakat harus mengakses layanan di lokasi yang berbeda-beda.	Mengelola dan mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pada Mal Pelayanan Publik (MPP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√		Pada tahun 2025 menambah sarana prasarana MPP (ruang laktasi, mebel, tempat parkir pegawai, dll)
2	Sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran NIB secara mandiri melalui sistem OSS-RBA.	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	√		Pada tahun 2025, bersama dengan dinas koperasi, ukm dan naker melaksanakan pendampingan NIB di kelurahan-kelurahan se-Kota Blitar
3	Kurangnya event tematik yang dapat mengintegrasikan promosi investasi dengan pengembangan	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi	√		Soekarno Coffe Festival diselenggarakan tanggal 13 – 15 Juni 2025, bertempat di depan Kantor

No.	Permasalahan/ kendala yang dihadapi	Strategi/ Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	ekonomi kreatif daerah.		kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota			Walikota Blitar dengan peserta 18 tenant untuk kategori Kota Blitar, 7 tenant kategori Kabupaten Blitar dan 4 tenant untuk kategori luar daerah Blitar.
4	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal.	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	√		Bimtek bagi pelaku usaha dilaksanakan pada tanggal 5 mei. 19 agustus, 20 agustus dan 24 Oktober 2025 dengan jumlah peserta total 350 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389	437,53	112,48%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,69)	A (86,44)	100,88%

Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi

Realisasi investasi pada Tahun 2025 mencapai Rp437,53 milyar, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp389 milyar. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 112,48%, yang berarti sasaran ini tercapai dan melampaui target.

Capaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Blitar semakin kondusif, yang didukung oleh:

- Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA,
- Kegiatan promosi dan fasilitasi investasi,
- Pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha,
- Koordinasi lintas perangkat daerah.

Capaian ini mencerminkan bahwa peran DPMPTSP dalam mendorong investasi berjalan efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian terdapat faktor penghambat dalam mencapai realisasi investasi tersebut, yaitu:

- Keterbatasan ketersediaan lahan usaha.
- Proses perizinan diluar kewenangan DPMPTSP.
- Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami persyaratan dan mekanisme perizinan.

Berikut disajikan Realisasi Investasi Kota Blitar Tahun 2025 Per Bidang Usaha.

Tabel 3.2
Realisasi Investasi Tahun 2025

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25	6.021.470.389	303
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	394	25.443.916.219	2295
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1	80.000.000	0
5	Treatment Air, Treartmen Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2	0	0
6	K o n s t r u k s i	608	39.206.152.129	28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1011	253.978.600.431	1078
8	Pengangkutan dan Pergudangan	55	467.941.000	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	163	24.978.493.734	596
10	Informasi dan Komunikasi	56	7.333.282.541	75
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3	2.294.965.373	7
12	R e a l E s t a t e	22	5.875.520.000	19
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	152	10.209.000.008	166
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	150	10.871.926.318	92
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0
16	P e n d i d i k a n	33	644.122.876	137
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	43	47.571.768.594	54
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15	1.333.500.000	10
19	Aktivitas Jasa Lainnya	37	1.209.600.000	6

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0
	JUMLAH	2770	437.520.259.612	4866

Tabel diatas menunjukkan bahwa struktur investasi didominasi oleh sektor *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor* dengan nilai investasi sebesar Rp253,98 miliar atau sekitar 58% dari total investasi. Hal ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis jasa dan perdagangan di Kota Blitar, yang sebagian besar didorong oleh perkembangan UMKM dan kegiatan usaha ritel.

Selanjutnya sektor *Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial* memberikan kontribusi terbesar kedua dengan nilai investasi sebesar Rp47,57 miliar, diikuti oleh sektor *Konstruksi* sebesar Rp39,21 miliar, *Industri Pengolahan* sebesar Rp25,44 miliar, serta sektor *Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum* sebesar Rp24,98 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur investasi Kota Blitar bersifat beragam dan tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor *Industri Pengolahan* menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 2.295 orang, diikuti sektor *Perdagangan* sebanyak 1.078 orang dan sektor *Akomodasi dan Makan Minum* sebanyak 596 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai investasinya tidak selalu terbesar, sektor industri pengolahan dan jasa memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi investasi Tahun 2025 berdasarkan skala kegiatan usaha menunjukkan bahwa sebesar Rp333,09 miliar atau 76,1% berasal dari UMK, sedangkan Rp104,43 miliar atau 23,9 % berasal dari Non-UMK. Komposisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kota Blitar lebih banyak

digerakkan oleh aktivitas ekonomi rakyat dan pelaku usaha lokal, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, industri kecil, dan usaha berbasis kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, investasi Non-UMK tetap memiliki peran strategis, khususnya dalam sektor-sektor dengan kebutuhan modal yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan, industri pengolahan (rokok) dan jaringan distribusi ritel modern, yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat kualitas layanan publik, rantai pasok, dan daya saing ekonomi lokal.

Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP DPMPTSP Tahun 2025 terealisasi sebesar 86,44, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 85,69. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,88%, yang menunjukkan bahwa sasaran tercapai dan melampaui target. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja DPMPTSP yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- Dukungan pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai dalam penerapan manajemen kinerja meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
- Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara konsisten dan berkala.
- Reviu dokumen perencanaan dan pelaporan dari instansi yang membidangi.
- Pemanfaatan aplikasi kinerja (aplikasi SAKIP).

Selain faktor pendukung tersebut, terdapat pula kendala atau faktor penghambat dalam mencapai kinerja, yaitu:

- Kualitas data kinerja yang belum sepenuhnya optimal.
- Pemahaman SDM terhadap SAKIP belum merata.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	387	389	385,06	432,73	437,53
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,85)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,66)	A (86,59)	A (86,44)

Jumlah realisasi investasi selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Tahun 2024 meningkat sebesar $\pm 12,38\%$ dan tahun 2025 $\pm 1,11\%$. Meskipun peningkatan pada tahun 2025 tidak sebesar tahun 2024, capaian ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Blitar tetap terjaga dengan baik serta adanya keberlanjutan minat investor dalam menanamkan modalnya. Secara keseluruhan, peningkatan realisasi investasi selama tiga tahun terakhir mencerminkan efektivitas kebijakan promosi penanaman modal, kemudahan pelayanan perizinan berusaha, serta meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi dan regulasi di Kota Blitar.

Untuk kinerja perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 nilai SAKIP 85,66, kemudian meningkat menjadi 86,65 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 86,44 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan yang tidak signifikan tersebut masih berada dalam kategori kinerja yang sangat baik dan tidak mempengaruhi secara substansial terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Fluktuasi nilai ini dapat dipengaruhi oleh dinamika dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan atau prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, capaian kinerja perangkat daerah selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik dengan predikat kinerja tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.502	1.600,54	106,56%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,71)	A (86,44)	100,85%

Sasaran Strategis "Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi" telah melampaui target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan investasi yang dilaksanakan, baik melalui upaya promosi penanaman modal, pemberian kemudahan berusaha, maupun peningkatan kualitas pelayanan perizinan, telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi di Kota Blitar. Selain itu juga mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku usaha dalam menanamkan modalnya dan kondusifnya iklim investasi di Kota Blitar.

Sasaran Strategis "Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah" telah memenuhi bahkan melampaui target akhir. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dan meskipun capaian telah melebihi target, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tetap perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan konsistensi kinerja.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Investasi			
		Nasional	Prov.Jatim	Kab. Blitar	Kota Blitar
Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.931,2 (triliun)	147,7 (triliun)	4,522 (triliun)	437,53 (milyar)

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional, Realisasi investasi nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.931,2 triliun. Pada tingkat provinsi, realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp 147,7 triliun, yang menunjukkan kontribusi signifikan provinsi dalam mendukung capaian investasi nasional. Selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota di wilayah yang sama, realisasi investasi di Kabupaten Blitar mencapai Rp 4,522 triliun, sedangkan realisasi investasi di Kota Blitar sebesar Rp 437,53 miliar atau setara dengan sekitar Rp 0,44 triliun.

Jika dibandingkan secara proporsional:

- Kontribusi investasi Provinsi Jawa Timur terhadap realisasi nasional mencapai sekitar 7,65%.
- Kontribusi Kabupaten Blitar terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Timur sekitar 3,06%.
- Kontribusi Kota Blitar terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Timur sebesar $\pm 0,30\%$, dan terhadap realisasi investasi nasional sebesar sekitar 0,02%.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara nominal realisasi investasi Kota Blitar masih relatif kecil dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, namun kontribusi yang diberikan tetap menjadi bagian dalam mendukung pencapaian target investasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	728.502.474	10,01%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.550.630.758	89,99%
Total Anggaran		7.279.133.232	100%

Tabel diatas menggambarkan bahwa sasaran strategis "Meningkatnya jumlah realisasi investasi" memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp728.502.474 atau sekitar 10,01% dari total anggaran. Proporsi anggaran ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan sasaran strategis lainnya, namun secara substansi telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target investasi tidak sepenuhnya bergantung pada besaran anggaran, melainkan juga pada efektivitas kebijakan, kemudahan pelayanan perizinan berusaha, serta dukungan iklim usaha yang kondusif.

Sedangkan sasaran strategis "Meningkatnya kinerja perangkat daerah" memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6.550.630.758 atau sekitar 89,99% dari total anggaran. Besarnya alokasi ini disebabkan karena di dalamnya mencakup komponen belanja pegawai sebesar Rp3.112.606.132, serta pembiayaan kegiatan rutin kesekretariatan dinas yang bersifat operasional.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389	437,53	112,48 %	728.502.474	688.491.538	94,51%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	60%	60,45%	100,75 %	78.852.000	58.933.000	74,74%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	55%	55,30%	100,55 %	257.396.974	256.788.000	99,76%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,6%	100%	100,40 %	297.511.000	282.518.388	94,96%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	80%	86,10%	107,63 %	94.742.500	90.252.150	95,26%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,69)	A (86,44)	100,88	6.550.630.758	6.387.176.782	97,50%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,8	90,75	107,02 %	6.550.630.758	6.387.176.782	97,50%
Total Anggaran					7.279.133.232	7.075.668.320	97,20%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran diatas menunjukkan bahwa seluruh sasaran dan program berhasil melampaui target kinerja (di atas 100%). Sedangkan dari sisi anggaran, tingkat serapan sebesar 94,51%. Meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100%, namun capaian kinerja mampu melampaui target, yang menandakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini diperkuat dengan capaian pada program pendukung, yaitu:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja "Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi" mencapai 60,45%. Secara kuantitatif, jumlah unit usaha yang teridentifikasi sebagai potensi investasi mengalami peningkatan signifikan dari 3.259 unit usaha pada Tahun 2024 menjadi 5.229 unit usaha pada Tahun 2025. Jika ditinjau berdasarkan bidang usaha, peningkatan potensi investasi terbesar terjadi pada sektor "Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor" dan "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum". Peningkatan pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Blitar masih didominasi oleh kegiatan usaha berbasis jasa dan perdagangan, yang relatif memiliki kemudahan dalam pengembangan usaha serta membutuhkan modal investasi yang lebih fleksibel dibandingkan sektor lainnya.

- Program Promosi Penanaman Modal

Pada Tahun 2024, jumlah informasi potensi investasi yang dipromosikan tercatat sebanyak 275 informasi, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 427 informasi. Dengan demikian, terdapat peningkatan jumlah informasi potensi investasi yang dipromosikan sebesar 152 informasi atau mengalami kenaikan sebesar 55,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi digital. Informasi potensi investasi daerah telah dipublikasikan secara aktif melalui akun media sosial Instagram dan TikTok DPMPSTSP Kota Blitar serta Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar. Pemanfaatan media

sosial menjadi strategi yang efektif dalam memperluas jangkauan promosi investasi karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas, cepat, dan interaktif, baik dari kalangan pelaku usaha lokal maupun calon investor di luar daerah. Strategi promosi berbasis digital ini tidak hanya meningkatkan publisitas potensi investasi daerah, tetapi juga mendukung upaya membangun citra positif pelayanan publik dan kemudahan berusaha di Kota Blitar.

- Program Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah permohonan perizinan yang masuk pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 4.506 permohonan, dengan jumlah izin yang diterbitkan juga sebanyak 4.506 izin. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin yang diajukan telah dapat diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga tingkat kesesuaian antara permohonan dan penerbitan izin mencapai 100%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses pelayanan perizinan berusaha dan non-berusaha di lingkungan DPMPTSP Kota Blitar telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Tingginya tingkat kesesuaian penerbitan izin sesuai SOP ini turut didukung oleh optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait, khususnya pada jenis layanan yang memerlukan rekomendasi teknis seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR). Selain itu, pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui OSS juga berkontribusi terhadap percepatan proses verifikasi dan penerbitan izin.

- Program Pengendalian Penanaman Modal,

Berdasarkan perhitungan indikator kinerja, realisasi persentase peningkatan perusahaan tertib LKPM pada Tahun 2025 mencapai 86,1%, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan

pembinaan, sosialisasi, serta pendampingan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Blitar kepada pelaku usaha telah berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman terkait kewajiban pelaporan LKPM melalui sistem OSS.

Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM juga mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan realisasi investasi di daerah. Selain itu, data LKPM yang dilaporkan secara tertib akan mendukung ketersediaan data investasi yang lebih akurat dan akuntabel sebagai dasar dalam perumusan kebijakan penanaman modal di Kota Blitar.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	112,48	94,51	1,2
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,88	97,50	1,03

Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya pada kedua sasaran strategis menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan antara tingkat capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Capaian kinerja yang melebihi target dengan tingkat serapan anggaran yang tidak selalu mencapai 100% mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah dilakukan secara tepat, sehingga mampu mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam rangka mendukung peningkatan realisasi investasi serta kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari capaian sasaran strategis "Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi" dengan realisasi sebesar Rp437,53 miliar atau 112,48% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa iklim investasi di Kota Blitar semakin kondusif serta adanya peningkatan kepercayaan pelaku usaha dalam menanamkan modalnya, yang didukung oleh kemudahan pelayanan perizinan berusaha, kegiatan promosi investasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha. Untuk sasaran strategis "Meningkatnya kinerja perangkat daerah" yang diukur melalui nilai SAKIP juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 86,44 atau 100,88% dari target. Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan DPMPTSP Kota Blitar telah berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Selain itu, realisasi kumulatif investasi sampai dengan Tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra dengan tingkat kemajuan sebesar 106,56%. Demikian pula capaian nilai SAKIP perangkat daerah yang telah melampaui target akhir Renstra dengan tingkat kemajuan sebesar 100,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah direncanakan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara

keseluruhan, capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan investasi serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar telah menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2025

No	Permasalahan/Kendala yang Dihadapi	Strategi/ Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Th 2026 (murni)	Th 2026 (perubahan)	Th 2027
1	Promosi potensi dan peluang investasi daerah belum optimal sehingga minat investor untuk menanamkan modal di Kota Blitar masih terbatas	Menyelenggarakan gebyar investasi	Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah proyek investasi pada tahun berikutnya	√		√
2	Perubahan regulasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Menyusun draft perubahan perwali terkait penyelenggaraan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Draft dokumen perubahan perwali terkait penyelenggaraan perizinan	√		
3	Kondisi fisik gedung dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan keamanan pelayanan publik,	Perbaikan sarana prasarana gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana prasarana gedung kantor yang lebih nyaman	√		√

No	Permasalahan/Kendala yang Dihadapi	Strategi/ Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Th 2026 (murni)	Th 2026 (perubahan)	Th 2027
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
4	Masih kurangnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS)	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM bagi pelaku usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimtek	√		√

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, semoga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Blitar, 27 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Lampiran A

Matrik Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026

VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur Dan Bermartabat

- MISI :
1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan.
 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter
 3. **Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital**
 4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan
 5. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi**

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi th n - Jumlah realisasi investasi th n-1 / Jumlah realisasi investasi th n-1 x 100	-37,15	0,47	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	167,1	389	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang	
Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan	A (84,8)	A (85,69)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan	A (84,8)	A (85,69)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 27 Februari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KOTA BLITAR**


HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197504091996021002

Lampiran B

RKT PERUBAHAN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya nilai investasi daerah
 Indikator : Persentase peningkatan nilai investasi daerah
 Target : 0,47%

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	60%	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	15.680.000
										Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	18.605.000
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia	1 dokumen	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.567.000
										Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	55%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	257.396.974
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,6 %	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1144 Pelaku Usaha	100.213.000
										Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3 Pelaku Usaha	68.990.000
										Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4135 Kegiatan Usaha	128.308.000

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	80%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	125 perusahaan	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha	26.925.000
										Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	47.897.500
										Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 kegiatan usaha	19.920.000

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,69)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,8 Indeks	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.600.500
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	60.973.550
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.112.606.132
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	1.736.000

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	7.800.000
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	62.718.794
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.959.500
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	108.671.900
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	41.340.600
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.440.000
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.940.000

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	105.440.000
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	210.452.175
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	452.398.096
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.272.844.710
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	144.173.501
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	720.982.600

N O	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	88.763.500
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	42.337.500
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	12.451.700

Blitar, 27 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA, BLITAR


HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Lampiran C

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU EKO PRAMONO, S.STP, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.
Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389.00(milyar rup)
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.69(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	94,742,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	297,511,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	257,396,974.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	78,852,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,550,630,758.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		7,279,133,232.00	



Lampiran D

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Ket
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	389	437,53	112,48		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.852.000	58.933.000	74,74	
								Program Promosi Penanaman Modal	257.396.974	256.788.000	99,76	
								Program Pelayananan Penanaman Modal	297.511.000	282.518.388	94,96	
								Program Pengendalian Penanaman Modal	94.742.500	90.252.150	95,26	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.550.630.758	6.387.176.782	97,50	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,69)	A (86,44)	100,88						

Blitar, 27 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR


HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002